



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

SEKRETARIAT DAERAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA. 2023

DISUSUN OLEH

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Gresik

KATA PENGANTAR

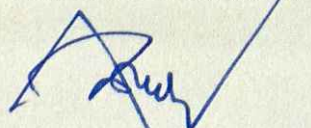
Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik .

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga tersusunnya laporan ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, 26 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH



Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP 19661027 199803 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 terlihat bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 2021-2026 dapat dilihat hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 105.47% dengan kategori "SANGAT TINGGI" dan rata-rata capaian anggaran sebesar 90.57% dengan kategori "TINGGI" dan efisiensi sebesar 9.88%.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 107.271.244.506,00 Jumlah tersebut telah direalisasikan

sebesar Rp.153,090,902,947.42 atau 91,73%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2023 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang.

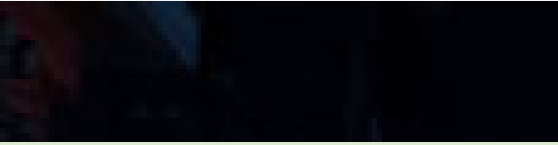
Uraian tingkat ketercapaian indikator kinerja sasaran strategis akan diuraikan lebih detail pada Bab III. Terhadap berbagai target capaian yang tidak tercapai, Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi kinerja agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
RINGKASAN EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	LATAR BELAKANG	1
A	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
B	Personil/Pegawai	3
C	Dukungan Anggaran	3
D	Tindak lanjut hasil evaluasi AKIP	4
E	Permasalahan Utama (strategic issued)	5
F	Sistematika Pelaporan	8
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	9
A	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	9
B	Cascading	11

DAFTAR ISI

C	Indikator Kinerja Utama (IKU)	12
D	Perjanjian Kinerja	14
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	15
A	Capaian Kinerja Tahun 2022	19
B	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Tahun sebelumnya	17
C	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun Akhir Rencana Strategis	19
D	Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	20
E	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Penunjang	34
BAB IV	PENUTUP	35
A	Kesimpulan	35
B	Saran	36
LAMPIRAN		37



LATAR BELAKANG



Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 diharapkan dapat :

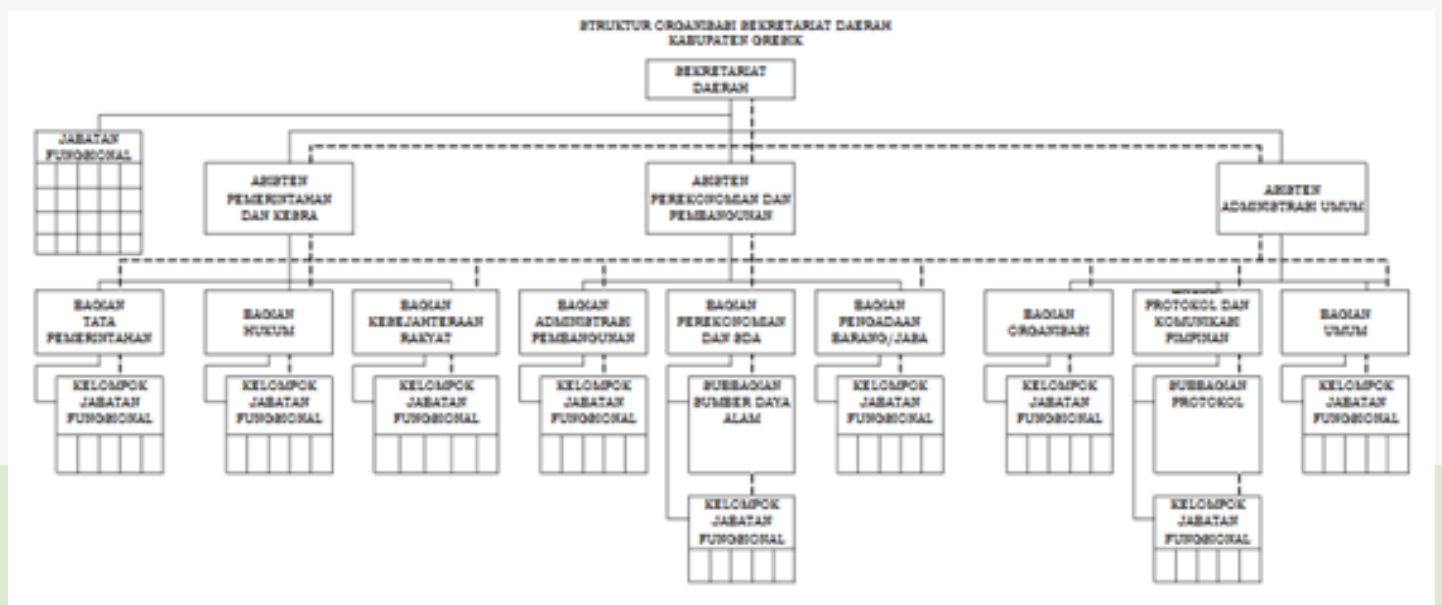
- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik,
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerjanya.

Gambaran Umum

A Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagai upaya mewujudkan kinerja, Sekretariat Daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan administratif dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sebagai berikut :

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Perangkat Daerah
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



B. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai sebanyak 128 orang (per 31 Desember 2023) dengan rincian sebagai berikut:

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan 1	0	0	0
2	Golongan 2	15	5	20
3	Golongan 3	36	55	91
4	Golongan 4	11	6	17

C. Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 berjumlah Rp.104.588.744.027,00. Dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp.107.271.244.506,00 mengalami penurunan sebanyak Rp.2.682.500.479 atau 2,5%. Rincian anggaran yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp.60.359.520.714,00
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rp.40.979.494.075,00
3. Program Perekonomian dan Pembangunan Rp.3.249.729.238,00



D. Tindak lanjut hasil evaluasi AKIP

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Agar Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran	Dokumen renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan renja
2	target jangka menengah dalam renstra dimonitor pencapaiannya	target renstra selalu dimonitoring melalui aplikasi SIAKRI
3	target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan	aplikasi SIAKRI telah diintegrasikan dengan aplikasi SIPANTAS
4	dokumen renstra di reviu secara berkala	pada bulan des 2023 telah dilakukan reviu terhadap dokumen renstra
5	agar penyajian informasi dalam laporan kinerja dijadikan kepedulian seluruh pegawai, digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja dan bisa mempengaruhi budaya kinerja	penyajian informasi dalam laporan kinerja digunakan sebagai dasar penyesuaian rencana strategis setda.
6	melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP	tindak lanjut has rekomendasi AKIP telah dilaksanakan
7	hasil evaluasi akip dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akintabilitas kinerja	hasil evaluasi akip dimanfaatkan untuk perbaikan sehingga selalu meningkat dari tahun ke tahun

E. Permasalahan Utama (strategic issued)

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah antara lain:

Konstelasi	No	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Nawakarsa	Isu Strategis Sekretariat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Global	1. 1.	Pemulihan Ekonomi dan Sosial Pandemi Covid-19	Lintas Sektor	Pengarusutamaan Kebijakan Pembangunan Pasca Pandemi
	1. 2.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Lintas Sektor	Pengarusutamaan Kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
	1. 3.	Revolusi Industri 4.0	Gresik Mapan, Gema Karya	Optimalisasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
	1. 4.	Perubahan Iklim	Gresik Lestari	Pengarusutamaan Kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di lingkup Perubahan Iklim
	1. 5.	Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia	Lintas Sektor	Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia
Nasional	2. 1.	Agenda Pembangunan Nawa Cita Tahun 2020-2024	Lintas Sektor	Integrasi Agenda Pembangunan Nawa Cita Tahun 2020-2024 dalam perumusan kebijakan Daerah
	2. 2.	Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019	Gresik Mapan	Harmonisasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah

	2. 3.	Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital	Gresik Mapan, Gema Karya	Perumusan kebijakan perekonomian inklusif
	2. 4.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Gresik Mapan, Gresik Cerdas, Gresik Sehat	Integrasi pencapaian standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan pembangunan Daerah
	2. 5.	Agenda Pembangunan Jawa Bali	Gresik Mapan	Harmonisasi Agenda Pembangunan Jawa Bali dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah
Jawa Timur	3. 1.	Agenda Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024	Lintas Sektor	Harmonisasi Agenda Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 dalam
				perumusan kebijakan pembangunan Daerah
	3. 2.	Agenda Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024	Gresik Mapan	Harmonisasi Agenda Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah
Gresik	4. 1	Tata Kelola Pemerintahan <i>Agile</i> berbasis Smart City dan Satu Data	Gresik Akas	Peningkatan tata kelola organisasi yang dinamis
	4. 2	Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam Reformasi Birokrasi	Gresik Akas	Pengarusutamaan Reformasi Birokrasi dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan Daerah Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan secara <i>by design, by process</i> , dan implementatif
	4. 3	Pengentasan Kemiskinan secara Inklusif	Gresik Seger	Pengarusutamaan kebijakan pengentasan kemiskinan dan inklusif
	4. 4	Daya Saing Daerah	Lintas Sektor	Perumusan kebijakan pembangunan untuk pembiayaan alternatif pembangunan Optimalisasi kebijaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

4.5	Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik	Gresik Mapan	Harmonisasi Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah
4.6	Penanggulangan Banjir Kali Lamong	Gresik Mapan	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Banjir Kali Lamong
4.7	Kemandirian Desa	Gresik Mapan	Pengarusutamaan kebijakan pembangunan berkelanjutan (sustainable Development Goal's)
			Keberdayaan Kelurahan
4.8	Ketahanan Pangan melalui Pembangunan Agropolitan dan Minapolitan	Gresik Agropolitan	Perumusan kebijakan dilingkup perekonomian inklusif
4.9	Ketenagakerjaan	Gema Karya	
4.10	Kualitas Pelayanan Pendidikan	Gresik Cerdas	Optimalisasi perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat
4.11	Kualitas Pelayanan Kesehatan	Gresik Sehati	
4.12	Keadilan dan Kesetaraan Gender	Lintas Sektor	Keadilan dan Kesetaraan Gender
4.13	Pengarustamaan Hak Anak	Lintas Sektor	Pengarustamaan kebijakan pembangunan berkelanjutan (sustainable Development Goal's)
4.14	Pengarustamaan Keluhuran Keagamaan Gresik	Gresik Barokah	Pengarustamaan Keluhuran Keagamaan Gresik
4.15	Pembangunan Ekologi Berkelanjutan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Gresik Lestari	Harmonisasi Pembangunan Ekologi Berkelanjutan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Parumusan Kebijakan Daerah

F. Sistematika Pelaporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja sekretariat daerah Kabupaten Gresik selama tahun 2

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

TUJUAN 1

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi

TUJUAN 2

Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan

Indikator Tujuan 1

- Indeks SPBE

Indikator Tujuan 2

- Indeks Inovasi Daerah

Sasaran

Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, & umum yang responsif

- Predikat AKIP
- Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan
- Indeks Kepuasan Pelayanan Umum

Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel

- Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD
- Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)
- Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah

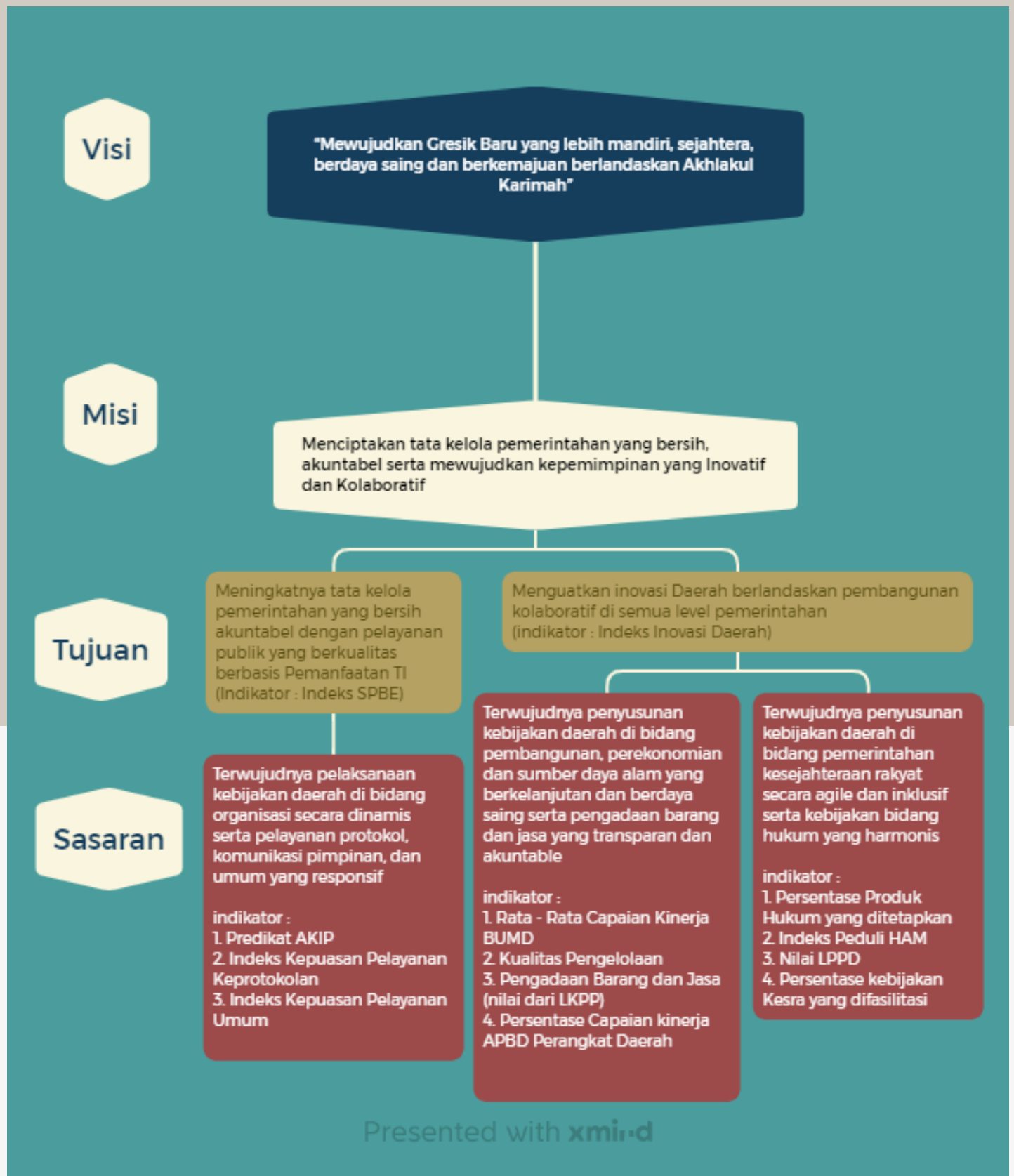
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis

- Persentase Produk Hukum yang ditetapkan
- Indeks Peduli HAM
- Nilai LPPD
- Persentase kebijakan Kesra yang difasilitasi

Matrik keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah tahun 2021-2026

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	>3	>3,1	>3,2	>3,25	>3,3	>3,35
		Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		Indeks Peduli HAM	-	>75	>75	>75	>75	>75
	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan SDA secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	level 3	level 3	level 3	level 3	level 4	level 4
		Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD			75%	75%	75%	75%
		Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah			75%	75%	75%	75%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	81.5	82	82.5	83	83.5	84
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

b. Cascading





c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN	IKU	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ditetapkan dalam surat keputusan Menteri dalam Negeri
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan dibagi Jumlah Kebijakan yang dibutuhkan x 100%	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tahun berkenaan Roadmap / rencana aksi/dokumen perencanaan sektoral
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan dibagi Jumlah Usulan Kebijakan x 100%	Dokumen lembaran daerah, berita daerah dan register keputusan kepala daerah
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	Mengacu Permenkumham 22 tahun 2021 tentang Kriteria Daerah/Kota Peduli HAM	Nilai Kabupaten/kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM

Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN	IKU	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 80% (delapan puluh persen) penyerapan APBD dibagi jumlah Perangkat Daerah x 100%	Dokumen Pelaporan realisasi PAPBD
	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Peraturan Kepala LKPP No. 5 Tahun 2019 tentang model pengukuran tingkat kematangan UKPBJ	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan hasil penilaian LKPP
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	Jumlah realisasi pendapatan BUMD dibagi target pendapatan x 100% dibagi jumlah BUMD	Dokumen lembaran daerah, berita daerah dan register keputusan kepala daerah
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Dokumen Hasil evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN RB
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

D. PERJANJIAN KINERJA

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TARGET
			2023
Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.2
		Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100%
		Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	90%
		Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	75
	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	level 3
		Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	75%
		Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	75%
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif
Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Baik		
Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Baik		



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Sekretaris Daerah dengan Bupati Gresik tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana table berikut :

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	91% <100%	sangat tinggi
2	76% < 90%	tinggi
3	66% < 75%	sedang
4	51% < 65%	rendah
5	<50%	sangat rendah

Capaian Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai berikut :

Capaian Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai berikut :

TUJUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	3.65	4.28	117,26%
menguatkan inovasi daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif disemua level pemerintahan	sangat inovatif	inovatif	75%

Berdasarkan 2 (dua) indikator tujuan Sekretariat Daerah terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja di kategori “Sangat tinggi”. Sedangkan satu indikator kinerja dengan capaian kinerja di kategori “Sedang” untuk mewujudkan tujuan Sekretariat Daerah didukung dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.2	3.07	96%
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100%	136.59	136.59%
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	90%	91.92%	102.13%
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	>75	94.3	125.73%

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	level 3	level 3	100
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	75%	83%	110.67
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	75%	93.48%	124.64
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	83	81.93	99.31
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Baik	Sangat Baik	100
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Baik	Sangat Baik	100

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 10 (sepuluh) indikator, seluruhnya memiliki katagori "Sangat tinggi" karena capaian kinerjanya lebih dari 91%-100%

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	REALISASI 2022	REALISASI 2023	KET
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2.47	3.07	Meningkat
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100%	136.59	Meningkat
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	100%	91.92%	Menurun
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	98.45	94.3	Menurun

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	REALISASI 2022	REALISASI 2023	KET
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	level 2	level 3	Meningkat
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	-	83%	-
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	69.57	93.48%	Meningkat
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	81.59	81.93	Meningkat
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Baik	Sangat Baik	Meningkat
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Baik	Sangat Baik	Meningkat

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 10 (sepuluh) indikator sasaran, terdapat 8 (delapan) indikator yang mengalami peningkatan. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya Sekretariat Daerah antara lain :

- Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan kesejahteraan seperti penyaluran Bantuan Sosial, hibah kepada lembaga, Masjid dan Mushola,
- Melaksanakan reviu SOP terkait pengadaan Barang dan Jasa
- Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap satu bulan sekali oleh Tim TEPR.
- Melakukan reviu terhadap dokumen pohon kinerja baik pada level Pemerintah Daerah maupun level Perangkat Daerah
- Mengembangkan Aplikasi SIAKRI dengan menambahkan fitur faktor pendukung dan faktor penghambat capaian kinerja
- Menyempurnakan Dokumen Indikator Kinerja Utama
- Menetapkan Perbup tentang Pedoman Evaluasi AKIP
- Penggunaan Segala platform media sosial seperti Tik Tok, Instagram dan youtube, untuk penyebaran informasi terkait kegiatan pimpinan.

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN AKHIR RENCANA STRATEGIS

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TARGET 2026	REALISASI 2023	KET
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.35	3.07	-
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100	136.59	+
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	90	91.92%	-
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	75	94.3	+
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	Level 4	level 3	-
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	75	83%	+
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	75	93.48%	+
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	84	81.93	-
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Baik	Sangat Baik	+
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Baik	Sangat Baik	+

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 terdapat 6 (enam) indikator dengan tingkat kemajuan POSITIF atau melebihi dari target akhir tahun rencana strategis dan 4 (empat) indikator dengan tingkat kemajuan NEGATIF atau belum melampaui dari target akhir tahun.

D. EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	492.791.700	490.552.555	99.55
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	36.778.802.000	33.917.864.150	92.40
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	645.125.000	562.339.447	87.17
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	924.489.340	621.451.590	67.22
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	531.184.300	467.089.546	87.93
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	606.602.959	286.359.075	47.21
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	1.046.930.224	1.025.229.335	97.93
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	378.540.679	330.866.444	87.41
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	4.402.844.000	4.355.991.135	98.94
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	61.463.934.304	55.092.752.005.35	89.63
JUMLAH		107.271.244.506	97.150.495.282.35	90.57

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian penyerapan anggaran tahun 2023 sebesar 90.57% kategori "TINGGI" dengan target sebesar Rp.107.271.244.506, Realisasi sebesar Rp.97.150.495.282,35

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	96%	99.55%	-4%
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	136.59%	92.40%	8%
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	102.13%	87.17%	13%
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	125.73%	67.22%	47%
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	100%	87.93%	12%
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	110.67%	47.21%	57%
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	124.64%	97.93%	21%
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	99.31%	87.41%	12%
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	100%	98.94%	1%
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	100%	89.63%	10%
Rata-rata		105.47%	90.57%	9.88%
Kategori		Sangat Tinggi	Tinggi	Efisien

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 105.47% dengan kategori "SANGAT TINGGI" dan rata-rata capaian anggaran sebesar 90.57% dengan kategori "TINGGI" dan efisiensi sebesar 9.88%

EFEKTIFITAS PENGUNAAN SUMBER DAYA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. Berikut rumus perhitungan efisiensi :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

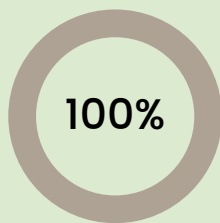
E : Efisiensi

PAK_i : Pagu anggaran keluaran i

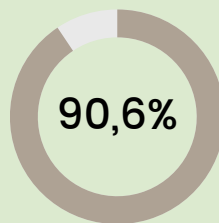
RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i

CK_i : Capaian keluaran i

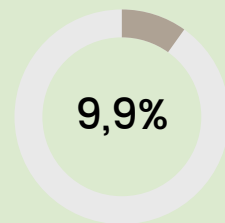
Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 105.47% dengan kategori "SANGAT TINGGI" dan rata-rata capaian anggaran sebesar 90.57% dengan kategori "TINGGI" dan efisiensi sebesar 9.88%



CAPAIAN KINERJA



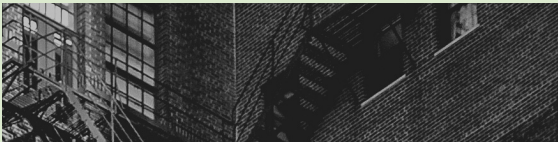
CAPAIAN ANGGARAN



EFISIENSI

“

JIKA DIBANDINGKAN TAHUN 2022 EFISIENSI
PENGUNAAN SUMBER DAYA MENGALAMI
PENINGKATAN DARI 8,3% MENJADI 9,88% SEHINGGA
DAPAT DISIMPULKAN SEKRETARIAT DAERAH EFISIEN
DALAM MENGGUNAKAN SUMBER DAYA



NILAI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dilihat bahwa nilai LPPD tahun 2022 adalah 3,0721 jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 3.2 maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 96% dengan kategori "SANGAT TINGGI".

Jika dibandingkan dengan nilai tahun 2021 sebesar 2.47 mengalami peningkatan sebesar 0.6 hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp.492.791.700 terealisasi sebesar Rp490.552.555 atau 99,55%

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran serta Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dalam penyusunan LPPD. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

FAKTOR PENDUKUNG :

- 1.Sosialisasi Penyusunan LPPD
- 2.melakukan Desk Bersama APIP terkait Pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- 3.Penggunaan aplikasi e-LPPD (<https://elppd.gresikkab.go.id/>) milik Kabupaten Gresik
- 4.Pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait kecukupan data dukung indikator kinerja kunci
- 5.penetapan Tim penyusun LPPD
- 6.Studi Tiru dengan Kota Madiun terkait pemenuhan data dukung penyusunan LPPD

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

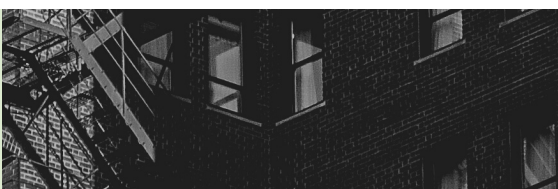
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.2.1.7-6646 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA
NASIONAL TAHUN 2023 BERDASARKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dipublikasikan pada website Pemerintah Kabupaten Gresik pada link : <https://gresikkab.go.id/dokumen/LPPD> sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi Pemerintah Kabupaten Gresik atas Capaian Kinerja yang dicapai setiap tahunnya.

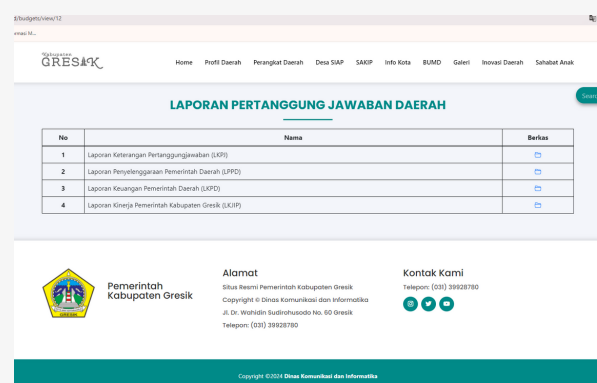
FAKTOR PENGHAMBAT :

1. Perangkat Daerah kurang memahami data dukung / kelengkapan indikator kinerja kunci
2. hasil evaluasi Kementrian Dalam Negri tidak disertai dengan rekomendasi tindak lanjut.

PROGRAM PENUNJANG :

Program Pemerintahan dan Kesra yang terdiri dari 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan antara lain :

1. Penataan Administrasi Pemerintahan
2. Pengelolaan Administrasi kewilayahan
3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
4. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negri



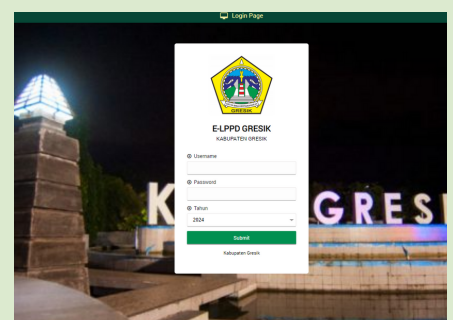
PUBLIKASI LPPD



STUDI TIRU KE KOTA MADIUN



SOSIALISASI PENYUSUNAN LPPD



PENGUNAAN APLIKASI E-LPPD

PERSENTASE KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DIFASILITASI

Pada Tahun 2023 jumlah kebijakan kesra yang targetkan adalah sebanyak 41 SK hibah dan bansos, akan tetapi sampai akhir tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak 53 SK hibah untuk lembaga dan tempat ibadah serta 3 SK untuk bansos

Sehingga dari target sebesar 100% kebijakan kesra yang difasilitasi terealisasi sebanyak 136.59% jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan 36.59% hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp.36.778.802.000 terealisasi 92.22%



Sosialisasi tempat ibadah dan lembaga organisasi kemasyarakatan

FAKTOR PENDUKUNG :

1. Melaksanakan Sosialisasi terkait Hibah tempat ibadah
2. Pendampingan pengajuan proposal sampai pertanggungjawaban
3. Ditetapkannya Perbup Nomor 12 Tahun 2023 tentang pedoman pemberian bansos (beasiswa)



Verifikasi proposal Hibah

FAKTOR PENGHAMBAT :

Kurangnya Kompetensi SDM pengelola Tempat ibadah sehingga proses pengajuan laporan pertanggungjawaban agak lambat

PROGRAM PENUNJANG :

Program Pemerintahan dan Kesra yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan antara lain :

1. Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual
2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat



Penyerahan Bansos Beasiswa

PERSENTASE PRODUK HUKUM YANG DITETAPKAN

Tahun 2023 usulan produk hukum yang masuk ke bagian hukum sebanyak 842, dan telah ditetapkan sebanyak 774 atau 91,92% dari target sebanyak 90% maka capaian tahun 2023 sebesar 102,13%, keberhasilan pencapaian kinerja tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp.645.125.000 terealisasi sebanyak Rp.562.339.447 atau 87,17%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 jumlah produk hukum yang diusulkan mengalami penurunan dari 952 produk hukum menjadi 842 produk hukum yang terdiri dari:

- 3 Surat Edaran,
- 10 MoU,
- 4 SK Sekda,
- 667 SK Bupati,
- 81 Peraturan Bupati dan
- 9 Peraturan Daerah

FAKTOR PENDUKUNG :

1. Dilaksanakan kajian terhadap produk hukum khususnya Peraturan Daerah terkait PAD
2. Dilakukan Sosialisasi Produk Hukum pada masyarakat
3. Optimalisasi aplikasi JDIH dengan pemanfaatan AI (artificial intelligence)

FAKTOR PENGHAMBAT :

Prosedur pengajuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati harus didahului evaluasi oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur sehingga waktu penetapan terlambat.

PROGRAM PENUNJANG :

Program Pemerintahan dan Kesra yang terdiri dari 2 SubKegiatan antara lain:

1. Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah
2. Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum



KAJIAN HUKUM



KAJIAN HUKUM



OPTIMALISASI JDIH



INDEKS CAPAIAN KABUPATEN PEDULI HAM

Nilai Peduli Ham Tahun 2022 adalah 94.3 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai tahun 2021 sebesar 98.45, akan tetapi jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 75 maka capaian tahun 2023 sebesar 125.73% hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp.924.489.340 terealisasi Rp.621.451.590 atau 67.22% sehingga efisiensi sumber daya sebesar 47%

FAKTOR PENDUKUNG :

- Terdapat klinik konsultasi Hukum kerjasama dengan akademisi seperti Universitas Airlangga Surabaya
- Pembentukan dan pembinaan Desa / Kelurahan Sadar Hukum agar lebih memahami hukum yang berlaku

- Tersedianya Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin
- Diselenggarakannya penyuluhan Hukum di Desa/ kelurahan

FAKTOR PENGHAMBAT :

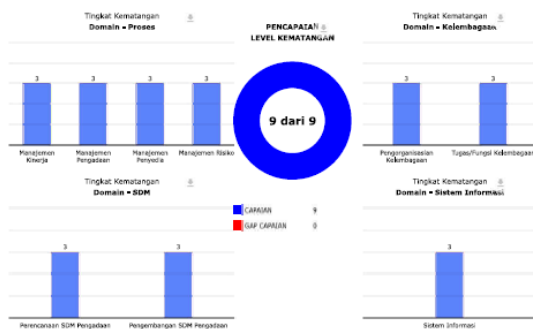
1. Turunnya nilai hak atas pekerjaan dan hak perempuan dan anak dikarenakan Terdapat beberapa data dukung pemenuhan hak yang tidak lengkap atau tidak terpenuhi.
2. Kurangnya koordinasi dengan OPD pengampu.

PROGRAM PENUNJANG :

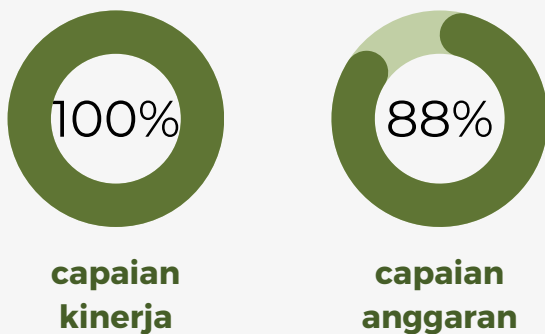
Program Pemerintahan dan Kesra yang terdiri dari 1 fasilitasi dan koordinasi hukum Kegiatan 1 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan

Hasil Pengisian Penilaian Mandiri
Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ
Kabupaten Gresik

Domain	Variabel	Key Drivers	Kriteria Pusat Keunggulan	Tingkat Kematangan Saat Ini	Rilevansi Bukti
Proses	1.1 Manajemen Pengadaan	Proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Menetapkan keamanan & keberlanjutan layanan pengadaan secara elektronik	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.2 Manajemen Penyedia	Tersedianya program pembinaan kepada penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.3 Manajemen Kinerja	Penerapan pengalihan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan MUI UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.4 Manajemen Risiko	Sudah diterapkan kode etik untuk para pengelola UKPBJ. Sistem manajemen risiko diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung
Kelembagaan	2.1 Pengorganisasian	Organisasi UKPBJ untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan	3	3	Unduh Bukti Dukung
	2.2 Tugas dan Fungsi	Pendampingan perencanaan pengadaan. Proses pemilihan, pendampingan pelaksanaan kontrak, Pembinaan SDM dan Kelembagaan UKPBJ. Pembinaan SDM PBJ. Layanan pengadaan secara elektronik	3	3	Unduh Bukti Dukung
SDM	3.1 Perencanaan SDM	Sudah dibuktikan Angket dan ADR berbasis data paket pengadaan tahun lalu serta penyesuaian peran UKPBJ untuk seluruh personel UKPBJ	3	3	Unduh Bukti Dukung
	3.2 Pengembangan SDM	Program pelatihan dan mentoring kompetensi pengadaan berbasis Standar Kompetensi Jabatan PBJP, Kompetensi Personel UKPBJ, Kompetensi Pengadaan Kelembagaan UKPBJ	3	3	Unduh Bukti Dukung
Sistem Informasi	4.1 Sistem Informasi	Penggunaan sistem yang mengintegrasikan mata rantai proses PBJ di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung



Berdasarkan Surat dari lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Gresik tingkat kematangan UKPBJ memiliki level Proaktif atau level 3, hal tersebut sesuai dengan target yang ditentukan pada tahun 2023 dengan level 3. sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%



KUALITAS PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (NILAI DARI LKPP)

FAKTOR PENDUKUNG

- Proses pengadaan terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan
- dilaksanakan pembinaan kepada penyedia
- reviu terhadap SOP
- Pembinaan SDM Pengadaan Barang jasa

FAKTOR PENGHAMBAT

Bagian layanan Pengadaan Barang dan jasa measih menjadi bagian dari sekretariat daerah sehingga tidak memenuhi persyaratan level 4 bahwa layanan pengadaan harus berdiri sendiri menjadi unit kerja

PROGRAM PENUNJANG

Kegiatan pengelolaan Pengadanaan Barang dan Jasa yang dibagi menjadi 3 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 531.184.300 terealisasi Rp.467.089.546 atau 87.93%

RATA - RATA CAPAIAN KINERJA BUMD

Berdasarkan laporan tahunan yang diberikan rata-rata capaian kinerja BUMD tahun 2022 adalah 83% angka tersebut diperoleh dari rata-rata pendapatan BUMD dibagi dengan target pendapatan dikali 100%. Berikut adalah data pendapatan BUMD :



BUMD	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Perumda Giri Tirta Gresik	11.069.451.995	9.399.668.922	85%
Bank Gresik	235.883.665.000	195.567.786.345	83%
Rata-rata	246.953.206.995	204.967.455.267	83%

Berdasar tabel diatas beberapa kendala yang dihadapi antara lain Adanya kredit bermasalah karena penurunan usaha dan PHK nasabah, untuk PDAM pendapatan tidak tercapai karena blm terpenuhinya full cost recovery sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan.

Sedangkan Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan antara lain



PERSENTASE CAPAIAN KINERJA APBD PERANGKAT DAERAH

Persentase capaian kinerja APBD Perangkat Daerah adalah jumlah perangkat daerah yang melakukan penyerapan anggaran minimal 80% dibagi jumlah seluruh perangkat daerah. Berdasarkan hasil laporan tahun 2023 sebanyak 43 PD melakukan penyerapan APBD sebanyak lebih dari 80% sehingga realisasi kinerja ini sebesar 93.48% jika dibandingkan dengan target 75% maka capaian kinerja tahun 2023 sebesar 124.64%

FAKTOR PENDUKUNG

- telah dibentuk Tim TEPRA untuk mengawal pelaksanaan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana anggaran yang telah disepakati.
- telah dilakukan monitoring dan evaluasi penyerapan APBD oleh Tim TEPRA secara berkala sehingga meningkatkan penyerapan APBD
- Melakukan rapat evaluasi dan desk terhadap Perangkat Daerah yang capaian pelaksanaan kegiatannya terlambat untuk membantu mencari alternative penyelesaian permasalahan serta mendorong Perangkat Daerah agar memacu pelaksanaan kegiatan

FAKTOR PENGHAMBAT

- Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran.
- adanya faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh Perangkat Daerah karena perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan oleh Kementrian atau Lembaga terkait





PREDIKAT AKIP

Predikat AKIP tahun 2023 adalah 81.93 meningkat sebanyak 0.34 dari tahun 2022 sebesar 81.59. jika dibandingkan dengan target sebesar 82 maka capaian tahun 2023 sebesar 99.31%.

Indikator ini ditunjang dengan pagu anggaran Rp.378.540.679 terealisasi sebesar Rp.330.866.444 atau 87.41% dengan efisiensi sumber daya sebesar 12%

FAKTOR PENDUKUNG :

- Telah dilakukan revidi terhadap dokumen pohon kinerja
- optimalisasi aplikasi SIAKRI dengan menambahkan fitur faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja
- menyempurnakan dokumen IKU dengan menyusun Peraturan Bupati tentang IKU
- Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi AKIP

FAKTOR PENGHAMBAT :

- Pohon kinerja belum disertai indikator kinerja

- Belum adanya keselarasan antara pohon kinerja dengan dokumen perencanaan
- sistem pengukuran kinerja belum terintegrasi sampai dengan kinerja individu

PROGRAM PENUNJANG :

Untuk melaksanakan sasaran ini ditunjang dengan 1 kegiatan penataan organisasi dengan 3 sub kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
2. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan
3. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana



Predikat AKIP Tahun 2023

INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN

BAHAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
PROKOPIM
KABUPATEN GRESIK



Cuplikan



Twitter

Nilai SKM pelayanan Keprotokolan tahun 2023 adalah 95.43 kategori "SANGAT BAIK" jika dibandingkan dengan target "BAIK" maka capaian kinerja pelayanan Umum telah melampaui target yang telah ditentukan. hal tersebut ditunjang dengan anggaran sebesar Rp4.402.844.000 dan terealisasi sebesar Rp4.355.991.135 atau 98.94%

jika dibandingkan dengan nilai SKM tahun 2022 sebesar 86.39. mengalami peningkatan sebanyak 9.04

FAKTOR PENDUKUNG :

Penggunaan Media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Gresik ke Masyarakat seperti penggunaan Instagram, Twitter, Youtube, Tik tok, Facebook.

FAKTOR PENGHAMBAT :

- Terbatasnya jumlah SDM yang mendampingi pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan

Jadwal kegiatan yang tidak pasti atau mendadak sehingga tidak terakomodir dengan baik

PROGRAM PENUNJANG :

Layanan ini ditunjang berbagai sub kegiatan antara lain :

1. Fasilitasi Keprotokolan
2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan





INDEKS KEPUASAN PELAYANAN UMUM

Nilai SKM pelayanan Umum tahun 2023 adalah 92.3 kategori “SANGAT BAIK” jika dibandingkan dengan target “BAIK” maka capaian kinerja pelayanan Umum telah malampaui target yang telah ditentukan. hal tersebut ditunjang dengan anggaran sebesar Rp61.463.934.304 dan terealisasi sebesar Rp.55.092.752.005.35 atau 89.63%

FAKTOR PENDUKUNG :

Pelatihan dan pembinaan pegawai
Bimtek

FAKTOR PENGHAMBAT :

- Terdapat kegiatan atau event yang mendadak / diluar perencanaan untuk mengakomodir kebutuhan pimpinan
- Kurangnya SDM yang memberikan layanan

PROGRAM PENUNJANG :

Layanan ini ditunjang dengan beberapa kegiatan antara lain :

- 1.Administrasi keuangan perangkat daerah
- 2.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4.Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8.Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 9.Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PENUNJANG



Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	2023	Bidang
		Target	
SASARAN 1. Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis			
Indikator 1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)			
Indikator 2. Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi			
Indikator 3. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan			
Indikator 4. Indeks Peduli HAM			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
	Persentase pemenuhan data dukung IKK	100%	Bagian Tata Pemerintahan
	Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Baik	Bagian Kesra
	Persentase Perda yang diproses	90%	Bagian Hukum
	Persentase Perbup yang diproses	90%	
	Persentase Keputusan Bupati yang diproses	90%	
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase data dukung IKK yang diverifikasi	100%	Bagian Tata Pemerintahan
	Jumlah pelayanan terpadu kecamatan yang difasilitasi	1 Pelayanan	
	Persentase kecamatan yang dilakukan perapatan batas wilayah	27.78	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi	5 MoU	Bagian Tata Pemerintahan
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang disusun	2 SK Penetapan	Bagian Kesra
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 Dokumen	

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	2023	Bidang
		Target	
Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil kebijakan, Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	3 Dokumen	
Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	11 Dokumen	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase rancangan peraturan daerah yang ditetapkan menjadi peraturan daerah	90%	Bagian Hukum
	Jumlah perkara hukum yang terselesaikan dan jumlah peserta yang disuluh	26 perkara dan 440 orang	
	Tingkat kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	700 dokumen	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	26 kasus	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	700 dokumen	
SASARAN 2. Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan SDA secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel			
Indikator 1. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)			
Indikator 2. Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD			
Indikator 3. Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan	100%	Bagian Administrasi Pembangunan
	Nilai Evaluasi Kinerja TPID	67.9	Bagian Perekonomian dan SDA
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	3	BPBJ
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	Bagian Administrasi Pembangunan
	Jumlah pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	4 Kali	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 Dokumen	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	2023	Bidang
		Target	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Kebijakan BUMD yang difasilitasi	5	Bagian Perekonomian dan SDA
	Jumlah laporan TPID	1	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5	
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil monitoring dan Evaluasi kebijakan SDA	1	Bagian Perekonomian dan SDA
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik dan Persandian	1	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan energi dan air, pekerjaan umum dan Penataan ruang, perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	1	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang dilaksanakan	100%	BPBJ
	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	160 dokumen	
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	160 dokumen	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	210 orang	
SASARAN 3. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif			
Indikator 1. Predikat AKIP			
Indikator 2. Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan			
Indikator 3. Indeks Kepuasan Pelayanan Umum			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Indeks Integritas Jabatan/Organisasi	1,9	Bagian Organisasi
	Persentase OPD dengan Nilai AKIP Minimal "A"	83%	

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	2023	Bidang
		Target	
	Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Perangkat Daerah	88	
	Persentase temuan pada laporan keuangan yang ditindaklanjuti	100%	Bagian Umum
	Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi	100%	
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi	100%	
	Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara	100%	
	Persentase Kegiatan Protokol dan Kehumasan yang difasilitasi	100%	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah Unit Pelayanan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat minimal "Baik"	73	Bagian Organisasi
	Persentase ketercapaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan OPD	78%	
	Jumlah rancangan peraturan bupati tentang perangkat daerah	5	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	47	
Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disampaikan tepat waktu	1 Laporan	Bagian Umum
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/bulan	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	141 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	Bagian Umum
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pakaian dinas yang disediakan	100%	Bagian Umum
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	27%	

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	2023	Bidang
		Target	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan perangkat daerah yang difasilitasi	100%	Bagian Umum
	Persentase pelaksanaan perjalanan dinas yang difasilitasi	100%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	220 Paket	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100%	Bagian Umum
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	105 Unit	
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100%	Bagian Umum

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	2023	Bidang
		Target	
	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Difasilitasi	100%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2304 Laporan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	Bagian Umum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	274 Unit	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	500 Unit	
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	820 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterimakan	100%	Bagian Umum
	Persentase penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterimakan	100%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang disediakan	100%	Bagian Umum
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	2023	Bidang
		Target	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket	
Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase realisasi Kegiatan Protokoler	100%	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
	Persentase Kegiatan Pimpinan yang dipublikasikan	100%	
	Persentase kegiatan pimpinan yang didokumentasikan	100%	
Fasilitasi keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1920	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.	365	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.	1,920	

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama Tahun 2023. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 2021-2026 dapat dilihat hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 109.51% dengan kategori "SANGAT BAIK" dan rata-rata capaian anggaran sebesar 85.52% dengan kategori "SANGAT BAIK" dan efisiensi sebesar 19.90%.



Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam PAPBD Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.107.271.244.506 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.97.150.495.282.35 atau 90.57%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2023 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang.



SARAN

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

- Membentuk TIM khusus untuk memantau kinerja BUMD
- Optimalisasi Aplikasi e-LPPD dengan menambahkan fitur penjelasan terkait data dukung yang diharapkan sehingga memudahkan perangkat daerah dalam menyusun LPPD
- Mendorong pemanfaatan pohon kinerja yang telah disusun dengan menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan, sehingga keselarasan antara pohon kinerja dan dokumen perencanaan dapat tergambar dengan baik;

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

LAMPIRAN



PK APBD 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.
Jabatan : Bupati Gresik
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 9 Januari 2023

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK



Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	1	Predikat AKIP	82.5
		2	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Baik
		3	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Baik
2	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)	3.2
		2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100 %
		3	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	90 %
		4	Nilai Peduli HAM	75
3	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntable	1	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	3
		2	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	75 %
		3	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	75 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 65,436,037,982	APBD
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 35,532,204,000	APBD
3	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp. 3,625,323,500	APBD
Jumlah			Rp. 104,593,565,482	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK



H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 9 Januari 2023
PIHAK KESATU
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK



Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661027 199803 1 001

PK PAPBD 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK



Gresik, 15 Nopember 2023

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661027 199803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	1	Predikat AKIP	82.5
		2	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Baik
		3	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Baik
2	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(LPPD)	3.2
		2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100 %
		3	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	90 %
3	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntable	4	Nilai Peduli HAM	75
		1	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	3
		2	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	75 %
		3	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	75 %
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 66,245,318,983	PAPBD
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 38,841,208,040	PAPBD
3	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp. 2,184,717,483	PAPBD
Jumlah			Rp. 107,271,244,506	

Gresik, 15 Nopember 2023

PIHAK KEDUA

BUPATI GRESIK



PIHAK KESATU

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Ir. Achmad Washil Miftahul Rachman, M.T.

Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661027 199803 1 001

